

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI PENGELOLAAN DANA BOS DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SDN RANGKAH VI SURABAYA

Putri Anafi Aisah ^{a)}, Innayatus Salisiya ^{b)}, Tiara Nafa Dela Puspita ^{c)}, Syunu Trihantoyo ^{d)}

^{a)} Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya, Negara Indonesia

^{*)}putri.22029@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *Quality education and qualified graduates are important demands in the face of increasingly fierce job competition. The presence of foreign educational institutions in Indonesia adds to the complexity of competition in the education market. To maintain competitiveness, improving the quality of education is crucial. In addition, basic education equity is also a focus, with the Nine-Year Compulsory Basic Education Program and support through the School Operational Assistance Program (BOS) to reduce the burden of education costs for students. School financial management is key in managing financial resources efficiently and accountably. This article explores the implementation of education financing through the management of the School Operational Assistance Fund (BOS) in improving the quality of education at SDN Rangkah VI, Surabaya. Using a qualitative research approach, this study highlights the planning, accounting, spending, monitoring and accountability of school finances. The government's efforts in creating an effective planning and supervision system are also examined. Education financing at SDN Rangkah VI is directed at distributing the benefits of education and managing the burden of education costs. By understanding the sources and allocations of education financing and through good financial management, it is hoped that the quality of education at SDN Rangkah VI can be significantly improved.*

Keywords: Education Financing, BOS, Education Quality.

Abstrak. Pendidikan yang bermutu dan lulusan yang berkualitas merupakan tuntutan penting dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat. Kehadiran lembaga pendidikan asing di Indonesia menambah kompleksitas persaingan dalam pasar pendidikan. Untuk menjaga daya saing, peningkatan mutu pendidikan menjadi krusial. Di samping itu, pemerataan pendidikan dasar juga menjadi fokus, dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan dukungan melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi siswa. Manajemen keuangan sekolah menjadi kunci dalam mengatur sumber daya keuangan dengan efisien dan akuntabel. Artikel ini mengeksplorasi implementasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu

pendidikan di SDN Rangkah VI, Surabaya. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, studi ini menyoroti perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perencanaan dan pengawasan yang efektif juga diperhatikan. Pembiayaan pendidikan di SDN Rangkah VI diarahkan pada pendistribusian manfaat pendidikan dan pengelolaan beban biaya pendidikan. Dengan memahami sumber dan alokasi pembiayaan pendidikan, serta melalui manajemen keuangan yang baik, diharapkan mutu pendidikan di SDN Rangkah VI dapat ditingkatkan secara signifikan.

Kata Kunci: Pembiayaan Pendidikan, BOS, Mutu Pendidikan.

Pendahuluan

Lembaga yang bermutu dan lulusan yang baik sudah menjadi tuntutan terhadap layanan Lembaga pendidikan, semakin mendesaknya tuntutan ini dikarenakan semakin ketatnya tingkay persaingan dalam lapangan kerja di masa depan dan yang lebih membahayakan apabila memungkinkan peluang terhadap Lembaga asing untuk membuka sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu persaingan yang terjadi antar Lembaga penyelenggara pendidikan dan pasar kerja semakin berat. Sebagai Upaya untuk meningkatkan daya saing lulusan antara lain dapat dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan (Mulya, 2019).

Begitu juga dengan pemerataan pendidikan dasar yang Dimana diwajibkan bagi seluruh warga negara Indonesia melalui program pemerintah yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Hal ini tentunya didukung dengan program pemerintah yang mengupayakan melalui Program Bantuan Operasional (BOS) yang dimana dapat meringankan beban bagi siswa terhadap permasalahan biaya pendidikan. Bagi sekolah Tingkat Dasar (SD) dan Tingkat Menengah Pertama (SMP) dibebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa lainnya (Muryati, 2016)

Manajemen keuangan sekolah merupakan aktivitas dalam mengatur keuangan yang ada di sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban akan keuangan sekolah. Keuangan sekolah merupakan hal yang sangat penting karena kegiatan disekolah yang kompleks membutuhkan pengaturan keuangan yang baik dan perlu diatur sebaik-baiknya. Oleh karena itu diperlukan manajemen keuangan yang baik pula. Tugas utama seorang pengelola keuangan adalah pada kegiatan perencanaan dan pengawasan, dalam kegiatan ini pemerintah juga mengupayakan agar program digunakan sebaik baiknya dengan cara menciptakan suatu sistem untuk perencanaan dan pengawasan terhadap program tersebut. Hal ini digunakan untuk menunjukkan tanggung jawab perencanaan dan pengawasan suatu sekolah yang tidak mudah dan harus melibatkan semua komponen.

Pembiayaan pendidikan adalah menitikberatkan upaya pendistribusian manafaat pendidikan dan beban yang harus ditanggung Masyarakat. Biaya pendidikan merupakan sejumlah nilai uang yang harus dibelanjakan atau jasa pelayanan yang harus diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan yang dimaksud juga berhubungan dengan distribusi beban pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak sekolah. Dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang

yang harus dibelanjakan, dari mana sumber pembiayaan pendidikan yang didapatkan, dan kepada siapa uang yang harus dibelanjakan (Mulyono, 2010)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasi proses pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan di SDN Rangkah VI Surabaya, pada tanggal 27 Februari 2024. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung terhadap praktik dan kondisi di lapangan. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti pengelola sekolah, guru, dan kepala sekolah, guna mendapatkan beragam perspektif dan informasi yang komprehensif. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang relevan terkait dengan pengelolaan dana BOS dan mutu pendidikan SDN Rangkah VI Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

Dalam dunia pendidikan, pengendalian atau manajemen keuangan merupakan hal yang berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan harus memperhatikan secara cermat komponen-komponen keuangan yang menjadi pondasi utama dalam menjalankan segala kegiatan dan program Pendidikan (Arifudin et al., 2016). Pengelolaan keuangan yang baik di sekolah menjadi kunci utama untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan dari berbagai inisiatif pendidikan. Dengan melakukan manajemen keuangan yang efektif, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa keuangan yang dimiliki digunakan secara optimal untuk mendukung proses pendidikan, mulai dari fasilitas belajar hingga pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik menjadi suatu keharusan bagi setiap pihak yang terlibat dalam dunia Pendidikan.

Program Pembiayaan di SDN Rangkah VI

Dalam memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan operasional sekolah, pemerintah mengeluarkan sebuah program yang dinamai BOS dengan kepanjangan Biaya Operasional Sekolah (Hadiyanto, 2004). menjelaskan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pendukung pelaksanaan program wajib belajar. Dalam proses mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah, maka diperlukan dana operasional sekolah atau yang dikenal dengan dana BOS (Widyatmoko & Suyatmini, 2017). Dengan adanya program dana bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOS) ini dulunya belum merata dibagikan kepada seluruh peserta didik namun seiring berjalannya waktu program ini sudah dapat dinikmati oleh seluruh peserta didik. Dikarenakan dalam program ini bantuan pendanaan yang didapatkan oleh sekolah berdasarkan jumlah banyak atau sedikitnya peserta didik dalam sekolah tersebut, jika peserta didik dalam suatu sekolah dengan jumlah yang banyak maka bantuan pendanaan akan juga banyak begitupun sebaliknya. Program ini diberikan kepada sekolah guna membiayai segala kegiatan yang dilaksanakan sekolah serta bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah seperti halnya di SDN Rangkah VI seluruh siswa sudah mendapatkan Bantuan Dana

Operasional Sekolah (BOS) tanpa terkecuali pendanaan ini dikelola sekolah untuk ditujukan dalam beberapa indikator, indikator tersebut diantaranya adalah: (a). Kegiatan ulangan (UAS), (b). Penggajian jasa pelatih ekstrakurikuler, (c). Pembelian ATK sekolah, (d). Biaya Daya Jasa seperti pembayaran air dan Listrik sekolah, (e). Perawatan sarana dan prasarana sekolah (f). Biaya Operasional.

Sumber Dana Bantuan Operasional di SDN Rangkah VI

Pada pengelolaannya, pendanaan Pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber namun dengan syarat sumber yang diperoleh sudah secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan (Solehan, 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SDN Rangkah VI Surabaya, terdapat 2 sumber pembiayaan yang diperoleh yaitu dari BOS dan BOPDA. Sumber pembiayaan yang pertama adalah dana BOS merupakan singkatan dari Biaya Operasional Sekolah (Anggraini, 2013). Sumber keuangan ini merupakan program dari pemerintah pusat yang diberikan untuk setiap sekolah negeri maupun swasta di Indonesia.

Pihak sekolah menjelaskan bahwa dana yang diterima dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalurkan sesuai dengan acuan 8 standar program yang diatur dalam pedoman teknis dana BOS. Mereka juga menegaskan bahwa jumlah dana BOS yang diterima berkaitan langsung dengan jumlah peserta didik yang terdaftar di sekolah tersebut. Semakin banyak peserta didik, semakin besar pula jumlah dana yang diterima, dan sebaliknya. Adapun perkiraan alokasi dana untuk setiap peserta didik adalah sebesar Rp. 1.500.000. Oleh karena itu, tiap sekolah akan menerima jumlah dana yang berbeda-beda tergantung pada jumlah peserta didik yang terdaftar di sekolah masing-masing.

Sumber Pembiayaan yang kedua yaitu dana BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) merupakan program dari pemerintah Daerah Provinsi. Pihak sekolah mengatakan penggunaan dana yang diperoleh dari BOPDA umumnya untuk berbagai keperluan, terutama untuk membayar gaji pegawai dan memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui penggunaan dana BOPDA, tujuannya adalah untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa-siswa dari keluarga miskin. Dengan demikian, diharapkan semua siswa dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa harus terkendala oleh masalah keuangan, sejalan dengan prinsip wajib belajar 9 tahun (Oktaviana & Handayani, 2019).

Dalam menjelaskan sumber dana di atas, terlihat bahwa orang tua tidak terlibat atau berpartisipasi dalam pembiayaan. Pihak sekolah SDN Rangkah VI sudah menyatakan bahwa orang tua dan masyarakat tidak ikut terlibat dalam pembiayaan kegiatan sekolah. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012 tentang larangan pungutan dan sumbangan biaya pendidikan yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Familyani & Handayani, 2020).

Tantangan Pengelolaan Dana BOS di SDN Rangkah VI

Pembiayaan pendidikan adalah hal yang kompleks dan melibatkan banyak faktor, baik dari segi individu maupun sistem pendidikan secara keseluruhan (Suyanto et al., 2020). Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pembiayaan pendidikan antara lain:

1. Ketidakmampuan ekonomi: Banyak individu atau keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan karena terbatasnya sumber daya finansial. Biaya pendidikan yang semakin tinggi dan seringkali tidak terjangkau bagi keluarga dengan pendapatan rendah.
2. Kesenjangan pendidikan: Kesenjangan pendidikan terjadi ketika individu dari latar belakang ekonomi yang berbeda memiliki akses yang berbeda terhadap pendidikan berkualitas. Individu dari latar belakang ekonomi rendah cenderung memiliki akses yang terbatas dan kesulitan dalam membiayai pendidikan yang lebih baik.
3. Beban utang: Siswa yang memperoleh pinjaman untuk membiayai pendidikan seringkali berakhir dengan beban utang yang besar setelah lulus. Ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk memulai karir atau membuat keputusan finansial yang penting seperti membeli rumah atau kendaraan.
4. Kurangnya dukungan pemerintah: Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam membantu membiayai pendidikan. Namun, kurangnya dukungan dan anggaran yang cukup dari pemerintah dapat membuat pendidikan menjadi kurang terjangkau bagi masyarakat.
5. Biaya pendidikan yang tidak proporsional: Biaya pendidikan seringkali tidak seimbang dengan kualitas pendidikan yang diberikan. Beberapa sekolah atau program pendidikan mungkin membebankan biaya yang sangat tinggi tetapi tidak memberikan pendidikan yang berkualitas. Ini dapat menyebabkan individu atau keluarga merasa kecewa dan frustrasi dengan biaya yang telah mereka keluarkan.

Tantangan dalam pembiayaan pendidikan dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada sektor pendidikan (Priyono & Setyawati, 2021). Beberapa pengaruh dari tantangan dalam pembiayaan pendidikan antara lain:

1. Kualitas pendidikan menurun: Tantangan dalam pembiayaan pendidikan dapat menyebabkan kualitas pendidikan menurun karena kurangnya dana yang tersedia untuk mendukung program pendidikan yang efektif. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas kurikulum, pelatihan guru, fasilitas pendidikan, dan teknologi pendidikan.
2. Rendahnya partisipasi siswa: Tantangan dalam pembiayaan pendidikan dapat menyebabkan rendahnya partisipasi siswa karena kurangnya akses ke pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi keluarga yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan.
3. Ketimpangan dalam akses pendidikan: Tantangan dalam pembiayaan pendidikan dapat menyebabkan ketimpangan dalam akses pendidikan karena keluarga yang kurang mampu tidak dapat memperoleh pendidikan yang sama dengan keluarga yang lebih mampu. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan pendidikan dan kesenjangan sosial.
4. Ketergantungan pada dana asing: Tantangan dalam pembiayaan pendidikan dapat menyebabkan ketergantungan pada dana asing yang dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional. Ketergantungan pada dana asing juga dapat membuat negara menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global.

5. Rendahnya inovasi dan riset: Tantangan dalam pembiayaan pendidikan dapat menyebabkan rendahnya inovasi dan riset karena kurangnya dana untuk mendukung riset dan pengembangan pendidikan yang inovatif. Hal ini dapat membuat negara terus tertinggal dalam inovasi dan teknologi pendidikan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang diinisiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dana ini dialokasikan kepada sekolah-sekolah negeri dan swasta untuk membiayai berbagai kegiatan operasional sekolah. Meskipun program ini telah berjalan cukup lama, pengelolaannya masih diwarnai berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks (Rakhmawati, 2018).

Kajian teori dapat membantu kita memahami kompleksitas permasalahan ini.

- A. Teori Kelembagaan menjelaskan bagaimana struktur dan aturan organisasi, seperti struktur organisasi sekolah yang tidak tepat dan aturan terkait pengelolaan dana BOS yang tidak jelas, dapat menghambat efektivitas penggunaannya. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS juga memperparah situasi ini.
- B. Teori Agensi menyoroti hubungan antara prinsipal (pemberi dana) dan agen (pengguna dana). Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antara pemerintah sebagai pemberi dana dan sekolah sebagai pengguna dana dapat menyebabkan miskomunikasi dan inefisiensi dalam penggunaan dana BOS. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pemerintah terhadap penggunaan dana BOS semakin memperparah permasalahan ini.
- C. Teori Kepemimpinan menunjukkan bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah dapat memengaruhi efektivitas program. Ketidakmampuan kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola dana BOS dapat menyebabkan penggunaan dana yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan tujuan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kepala sekolah dalam mengelola keuangan menjadi faktor yang memperparah situasi ini.
- D. Teori Akuntabilitas menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana BOS dapat menimbulkan kecurigaan dan korupsi. Kurangnya mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS juga menjadi faktor yang memperparah permasalahan ini.

Kompleksitas tantangan dan hambatan dalam pengelolaan dana BOS ini menunjukkan bahwa diperlukan solusi yang komprehensif. Solusi tersebut harus mencakup perbaikan struktur dan aturan organisasi, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta pengembangan kapasitas kepala sekolah dalam mengelola keuangan dan memimpin program BOS (Jeandry & Mokoginta, 2021).

Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menyelesaikan tantangan dalam pembiayaan pendidikan agar sektor pendidikan dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan dalam pembiayaan pendidikan adalah dengan mencari sumber pendanaan alternatif dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana Pendidikan

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rangkah 6 Surabaya adalah terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana BOS. Fenomena ini dipicu oleh volume alokasi dana yang signifikan yang harus ditangani oleh pusat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Konsekuensinya, proses pencairan dana BOS menjadi terhambat, mengakibatkan kesulitan dalam membiayai berbagai kegiatan dan kebutuhan pendidikan di SDN Rangkah 6. Dampaknya, para pendidik terpaksa menggunakan sumber daya keuangan pribadi untuk menutupi kekurangan dana BOS yang tertunda, yang pada gilirannya dapat menyebabkan beban finansial yang tidak terduga dan pembatasan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sekolah. Oleh karena itu, upaya perbaikan dalam pengelolaan dana BOS di SDN Rangkah 6 Surabaya harus ditekankan, termasuk peningkatan efisiensi dalam pencairan dana serta perbaikan proses pengelolaan dana, guna memastikan kelancaran pembiayaan berbagai kegiatan pendidikan tanpa mengorbankan sumber daya pribadi para pendidik.

Penggunaan Dana BOS di SDN Rangkah VI

Pembiayaan pendidikan merupakan kompo-nen yang esensial dan tidak dapat terpisahkandalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi sumber dayamanusia (SDM), penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil (RISKI, 2018). Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan Pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan ber-kesinambungan sesuai dengan perencanaan program. Pada SDN Rangkah VI Surabaya, manajemen keuangannya dilaksanakan dan dikelola oleh tim keuangan dan bendahara sekolah namun tetap dengan melibatkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah tersebut. Dana BOSNAS dan BOPDA yang diterima oleh SDN Rangkah VI Surabaya akan dipetakan untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan (SNP) yang dibutuhkan. Kemudian peran dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam manajemen keuangan di SDN Gunungsari III Surabaya ini adalah dengan membantu tim keuangan dalam melaksanakan need assessment atau analisis kebutuhan dalam rangka pemenuhan 8 standar nasional pendidikan (SNP) ialah Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan yang mana nantinya jika memang dibutuhkan anggaran dalam pemenuhan 8 SNP tersebut maka tim keuangan akan menganggarkannya pada dana BOSNAS dan BOPDA yang diterima oleh SDN Rangkah VI Surabaya. Sehingga dalam penerapannya, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di

luar tim keuangan sekolah pun terlibat dalam manajemen keuangan sekolah, sehingga dapat bersinergi untuk mengelola keuangan yang baik pada sekolah tersebut.

Transparasi

Pentingnya untuk menerapkan sistem transparansi dengan baik pada tiap masalah pembiayaan pendidikan (Utama & Setiyani, 2014). Secara ringkas prinsip transparansi paling tidak dapat

diukur melalui sejumlah indikator seperti a) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik, b) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, c) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi (Malo, 2016). Transparansi pembiayaan pendidikan di SDN Rangkah VI terklasifikasikan pada kategori yang baik. SDN Rangkah VI merupakan sekolah dasar negeri yang mana segala hal yang berkaitan dengan keuangan sekolah didanai oleh pemerintah melalui dana BOSNAS dan dana BOSDA. Berasal dari hal tersebut, penting untuk kiranya menerapkan aspek transparansi yang baik, sebab nantinya akan ada proses pelaporan terkait penggunaan dana dari pemerintah tersebut. Aspek transparansi keuangan di SDN Rangkah VI Surabaya diterapkan dengan cara melakukan pelaporan kegiatan keuangan berupa SPJ yang dimana SPJ tersebut dapat berupa *softfile* untuk dipertanggung jawabkan dan dikumpulkan melalui sistem pusat dan berupa *hardfile* atau cetak yang digunakan sebagai arsip sekolah dan pelaporan bulanan kepada kepala sekolah dan jajaran tenaga kependidikan. Dengan demikian maka transparansi terkait keuangan sekolah dapat terjaga dengan baik. Hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Kepala Sekolah, yakni Ibu Rita Erwiyah, dimana beliau menghimbau kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan sekolah. Kemudian beliau juga rutin mengadakan rapat beserta para guru, komite sekolah, dan tenaga kependidikan guna mendiskusikan beberapa hal berkaitan dengan keuangan sekolah. Dengan demikian maka beliau selaku kepala sekolah melaksanakan transparansi yang baik dengan melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses keuangan sekolah, serta untuk mengetahui bagaimana keuangan sekolah sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian di SDN Rangkah VI Surabaya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut mengandalkan dua sumber utama, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dari Pemerintah Daerah Provinsi. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional sekolah, mulai dari pembayaran gaji pegawai hingga pemenuhan kebutuhan belajar mengajar seperti pembelian alat tulis dan biaya listrik sekolah.

Ketika membahas sumber dana, perlu dicatat bahwa dana BOS disalurkan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar di sekolah. Semakin banyak peserta didik, semakin besar pula dana yang diterima. Namun, hal ini tidak berarti bahwa orang tua dan masyarakat tidak memiliki peran sama sekali. Meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam pembiayaan, transparansi dalam pengelolaan dana sekolah di SDN Rangkah VI dijaga dengan baik.

Pentingnya transparansi tercermin dalam praktik pelaporan keuangan yang teratur, seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun dan dikumpulkan baik dalam bentuk *softfile* untuk pemerintah pusat maupun *hardfile* sebagai arsip sekolah. Proses ini melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah, Ibu Rita Erwiyah, terlibat secara aktif dalam menjaga transparansi ini dengan mengadakan rapat rutin

dan menghimbau seluruh warga sekolah untuk melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan sekolah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan Pendidikan melalui pengelolaan dana BOS di SDN Rangkah VI Surabaya telah dilakukan dengan efektif dan transparan. Keterlibatan seluruh warga sekolah dalam pengelolaan keuangan telah mendukung tercapainya tujuan mutu pendidikan yang lebih baik bagi siswa-siswa di sekolah tersebut.

Referensi

- Anggraini, R. D. (2013). Transparansi , Partisipasi , dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(2), 201–208.
- Familyani, E. D., & Handayani, N. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Pengelolaan Dana Bopda Sdn Wonorejo Iii/314 Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan ...*, 20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3640><http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3640/3656>
- Hadiyanto. (2004). *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. 1–197.
- Jeandry, G., & Mokoginta, R. M. (2021). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, BUDAYA ORGANISASI, PROACTIVE FRAUD AUDIT, DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA BOS (Studi Empiris Pada Sekolah Dasar Kota Ternate). *Jurnal TRUST Riset Akuntansi*, 9(1).
- Malo, K. (2016). Analisis Kausalitas Antara Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendidikan Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 5(1), 50–53.
- Mulya, C. (2019). Implementasi Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengelolaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 3(2), 149–154.
- Mulyono. (2010). *Konsep pembiayaan pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana Bos Pada Sd Negeri Di Upt Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 237. <https://doi.org/10.21831/amp.v4i2.10802>
- Oktaviana, K. R., & Handayani, N. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Di Sdn Sawahan I/340 Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2129>
- Priyono, S., & Setyawati, R. (2021). EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMK NEGERI 1 KEBUMEN TAHUN 2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 248–263.

- Rakhmawati, I. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 95–112.
- RISKI, A. (2018). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Universitas Negeri Padang*, 1–8.
- Solehan. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Edumaspul, jurnal pen(1)*, 98–105.
- Suyanto, S., Hasibuan, L., & US, K. A. (2020). KONSEP DASAR EKONOMI PENDIDIKAN PADA TATARAN SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 143–151.
- Utama, D. A., & Setiyani, R. (2014). PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN RESPONSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU Daniel Aditya Utama 1 Rediana Setiyani 2. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, 9(2), 100–114.
- Widyatmoko, S., & Suyatmini, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasan I Surakarta. *Manajemen Pendidikan*, 12(3), 153–160.
<https://doi.org/10.23917/jmp.v12i3.5528>